

DAFTAR PUSTAKA

- Aia, zakiyudin .2013. *Akuntansi Tingkat Dasar Dilengkapi Dengan Akuntasn* Bagi Organisasi Pengelolaan Zajar. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azhar, Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung : Lingga Jaya.
- Indrawan, R dan Yuniawati. P. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Azmi, Fatimah. 2018. *Peranan Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Sedang tahun 2017)*. Skripsi Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. Medan.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKD). *Anggaran Pemerintah Desa Pusat*. Tersedia : www.bpkp.go.id[Oktober 2021]
- Carl S. Warren dkk. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Selambe Empat.
- Eliyana, Diana, Junaidi. 2021. *Peran Perangkat Desa Dalam Aluntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Pekalongan Dan Desa Sukalela Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Vol.10 No.10.
- Indrawan, R dan Yuniawati, P. 2014. *Metodologi Peneiitian*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kinasih, A., Bawono, I., & Faturokhman, A. (2019). *Pengaruh Peran dan Kompetensi Perangkat Desa serta Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas*. Jurnal. Universitas Jenderal Soedirman.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa pada Masa Transisi*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Lonto, Morasa, Pusung. 2022. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan)*. Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum Vol.6 No.1.
- Ludwiga, Luki. 2019. *Peranan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kabupaten Pangandaran)*. Skripsi pada Program Studi Akuntansi FE Universitas Galuh. Ciamis.

- Luksiyo, Ruliana, Solihin. 2018. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat)*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
- Mahardita, Hayuning Rizki. (2017). *Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No.1, 133-144.
- Moenir. 2003. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Moenir. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bandung: PT. Bumi. Aksara.
- Nazir, Moh.2013. *Metode Penelitian*. Bogor.PT. Ghalia Indonesia.
- Noerdiawan, Dedi. 2012. *Anggaran Disuatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oktaviona, Andriani, Gustati. 2022. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Nagari Rao-Rao Kecamatan Tarab Kabupaten Tanah Datar)*. Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia Vol.2 No.1.
- Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi I Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Shatu, Yayah Paudin. 2016. *Kuasai Detail Akuntansi Laba dan Rugi*. Jakarta Pustaka Ilmu Semesta.
- Rasman. 2018. *Kompetensi Aparatur Desa Di Wilayah Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah*. Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.
- Rindorindo, Tanor, Pangkey. 2021. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal Manado Vol. 2 No.1.
- Rukajat, Ajat.2013. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Edisi I Cetakan Pertama.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta : Edisi Pertama. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif*. Bandung : Cetakan Ke- 1.CV. Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sukmawidewi, Kamilia. Dan Nugraha, Darya Setia. 2021.*Peran Kompetensi Aparatur Desa untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:Studi Kasus di Desa Sukasenang Kabupaten Garut:Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National SeminarBandung, 4-5 Agustus 2021*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung. Bandung.

- Sumarsan, Thomas. 2013. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Akuntansi Dasar dan Aplikasi dalam Bisnis Versi IFRS*. Jakarta: Indeks.
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Triantias, A. 2015. *Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintahan Daerah*. Skripsi pada Program Studi Akuntansi FE Universitas Jember. Jember.
- Tri Indrianasari, Neny. 2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak Vol. 1 No.2.
- Wibowo. (2014) . *Manajemen Kinerja. Edisi Keempat*. Jakarta Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Sususnan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kapabilitas pemerintahan.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.